

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masjid Agung Albania atau biasa disebut juga dengan Masjid Agung Tirana, dibangun tepat di ibu kota Albania, Tirana. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas 10 hektar ini, diklaim menjadi masjid terbesar di Albania, bahkan seantero Balkan, dengan kapasitas jamaah sebanyak ± 4.500 orang (Shkulaku, 2014). Pembangunan ini tentu menjadi kabar gembira bagi komunitas Muslim di Albania, karena telah lama sekali sejak jatuhnya rezim komunis di Albania pada tahun 1991, komunitas Muslim di sana telah menanti hadirnya masjid yang mampu menampung peribadatan mereka. Proyek pembangunan masjid di Albania pernah dicanangkan pada tahun 1992 oleh Presiden Sali Berisha, di dekat alun-alun Namazgah dan gedung parlemen (Likmeta, 2010), namun proyek tersebut dihentikan semenjak Ketua Parlemen Pjeter Arbndori menentanginya karena khawatir membuat Albania terlihat seperti Republik Islam. Sementara itu, selama dua dekade terakhir, sebuah katedral Katolik dan Ortodoks telah dibangun atas perizinan resmi pemerintah, sehingga menimbulkan sentimen diskriminasi antar umat beragama (Likmeta, 2010).

Keragaman agama masyarakat Albania dapat dilihat pada susunan demografisnya, terdapat sekitar 70 persen populasi Albania beragama Islam, 20 persen beragama Ortodoks, dan 10 persen sisanya beragama Katolik (Babuna, 2003: 2). Selama rezim komunis berkuasa, pada tahun 1967, Albania diproklamasikan sebagai negara ateis pertama di dunia. Praktik-praktik beribadatan dilarang, sebagian besar masjid dan gereja dihancurkan atau diubah menjadi gudang atau balai pemuda (Likmeta, 2010). Rezim komunis yang dipimpin Hoxha tersebut, sering kali menisbatkan Ottoman – atau Islam secara umum – dengan keterbelakangan, ketertinggalan, dan penindasan. Hal ini di kemudian hari menumbuhkan kuatnya arus utama politik yang melihat bahwa Islam tidak sesuai dengan ‘Eropa’. Terdapat anggapan orang-orang Islam di Albania yang merasa

seperti ‘mayoritas terdiskriminasi’ di antara sedikit negara negara-negara mayoritas Muslim di Eropa (Colborne, 2018). Sehingga, pasca keruntuhan rezim komunis Hoxha, bangsa Albania berusaha mendefinisikan ulang identitas nasionalnya, menyandarkan fondasi negara-bangsa pada kesamaan bahasa, budaya, dan kekerabatan yang kemudian menjadi elemen sentral dari nasionalisme Albania (Babuna, 2003: 2).

Setelah rencana proyek pembangunan masjid Namazgah dilupakan masyarakat, pada tahun 2010, Wali Kota Edi Rama mengumumkan bahwa sebuah masjid baru yang modern pada akhirnya akan dibangun. Hal ini menanggapi rendahnya kapasitas satu-satunya masjid di Tirana, Masjid Et’hem Bey, yang hanya dapat menampung sekitar 60 orang (Hürriyet Daily News. 2014). Bahkan pada momen-momen hari raya umat Islam, sejumlah jamaah harus mengambil tempat di selasaran masjid, alun-alun atau bahkan di jalanan raya. Sehingga, pada saat Edi Rama kemudian terpilih menjadi Perdana Menteri Albania pada tahun 2013, ia merealisasikan rencananya untuk membangun sebuah Masjid Agung di Tirana dengan menyetujui pendanaan pembangunan yang berasal dari Diyanet – Direktorat Urusan Agama di Turki – melalui *Türk İşbirliği ve Koordinasyon İdaresi Başkanlığı* (TİKA) atau Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki (Beck, 2019). Meskipun menimbulkan banyak sekali pro-kontra, namun rencana ini terus berjalan hingga dimulainya konstruksi pada Januari 2015.

Memang, Turki sendiri sejak Erdogan berkuasa, kerap kali terlihat memiliki ambisi yang sangat besar untuk memberikan sumbangan pendanaan untuk proyek-proyek pembangunan masjid di luar negaranya. Sumbangan pendanaan tersebut digawangi langsung oleh Diyanet, yakni sebuah Direktorat Urusan Agama yang bersifat transnasional dan selalu mengalami perubahan, bergantung pada preferensi dan kebijakan dalam maupun luar negeri pemerintah Turki (Öztürk, 2018: 2). Organisasi ini didirikan pada tahun 1924, namun mulai berkembang pesat di bawah rezim Erdogan. Dengan lebih dari 100.000 pegawai, anggaran Diyanet telah berkembang lebih dari empat kali lipat sejak 2006 – selama masa jabatan pertama Erdogan sebagai perdana menteri – menjadi TRL 12,5 miliar atau setara dengan

USD 2 miliar di tahun itu (Beck, 2019). Angka tersebut bahkan lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan dengan kementerian lainnya di Turki. Dilansir dari situs resmi *Turkiye Diyanet Vakfı* (TDV) – yayasan wakaf setingkat di bawah Direktorat Urusan Agama –, terdapat setidaknya 103 masjid di luar negeri yang berada di bawah naungan Diyanet (tdv.org, diakses pada 2020).

Apabila ditarik lebih jauh kebelakang, ambisi untuk mendanai proyek-proyek pembangunan masjid di luar negeri tersebut erat kaitannya dengan usaha-usaha penafsiran ulang identitas Turki sejak tahun 1980-an. Hal ini ditunjukkan ketika Diyanet dalam sejarahnya, menurut Öztürk (2018: 3) mengalami tiga fase perubahan. Fase awal (1924-1980), ketika Republik Turki baru saja terbentuk, Diyanet didirikan untuk mengatur perwujudan kolektif dan individu Islam di ruang publik dan privat, serta untuk mengelola seluruh institusi Islam yang ada di Turki. (Öztürk, 2018: 3). Pada fase awal ini, Turki menganut ideologi sekularisme ala-Turki atau yang biasa disebut dengan ideologi Kemalisme dengan digawangi oleh militer Kemalis sebagai ‘punggawa sekularisme’.

Fase kedua dimulai setelah kudeta tahun 1980, Diyanet mulai diberi tugas untuk mengkonsolidasikan solidaritas dan persatuan nasional sambil menjalankan fungsi yang ditetapkan oleh Undang-Undang (Öztürk, 2018: 5). Fase kedua tersebut dilatarbelakangi oleh instabilitas politik dalam negeri yang disebabkan oleh kudeta 1980 karena konflik bersenjata antara partai sayap kanan dan kiri selama satu dekade, serta kudeta oleh militer Kemalis yang memaksa Perdana Menteri terpilih, Necmettin Erbakan – yang berasal dari partai Islam – untuk mundur dari jabatan. Fase ketiga dimulai pada saat rezim AKP berkuasa sejak 2002 hingga saat ini (Öztürk, 2018: 7). Pada fase ketiga ini, Erdogan mulai menggunakan Diyanet sebagai bagian dari instrumen untuk mewujudkan pandangan Neo-Ottomanismenya. Evolusi tugas dan fungsi Diyanet tersebut mengindikasikan bahwa terdapat serangkaian usaha para aktor domestik untuk menggunakan Diyanet sebagai instrumen untuk suksesi kepentingan ideologisnya.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti karena menawarkan ide alternatif dalam memandang sumbangan dana Turki atas pembangunan masjid, yakni melalui

analisis identitas nasional Turki. Sumbangan internasional yang biasanya diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan materiil seperti pangan, kesehatan, dan lain-lain, dianggarkan sedemikian besarnya hanya untuk kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan mengenai alasan Turki untuk memberikan sumbangan dana pembangunan masjid di luar negerinya, khususnya yang telah terealisasi di Albania. Konstruksi identitas yang dijelaskan penulis merujuk pada pembentukan identitas baru Turki dan pengaruhnya terhadap kebijakan pendanaan pembangunan masjid di Albania. Selain itu, konstruksi juga dijelaskan dengan bagaimana elit pemerintah mengonstruksi pemahaman Turki terhadap dirinya sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa yang menyebabkan Turki memberi bantuan untuk mendirikan masjid di Albania?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan menyelidiki proses dan latar belakang Turki dalam melaksanakan kebijakan pembangunan masjid-masjid di luar Turki, khususnya yang terjadi di Albania. Mengingat Albania berbentuk negara sekuler pasca kemerdekaannya, namun tidak dapat dipungkiri Albania sebagai bangsa memiliki kedalaman historis dengan bangsa Turki di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Sehingga penelitian ini juga bermaksud untuk mengkonfirmasi bahwa kedalaman historis dan konstruksi identitas nasional menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan masjid yang dilakukan oleh Turki di Albania.

1.4 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka terkait penelitian kali ini dilakukan dengan membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan kebijakan pendanaan Turki atas pembangunan masjid di Albania. Beberapa tulisan berikut menjadi rujukan penulis dalam memotret fenomena tersebut.

Tulisan pertama penulis ambil dari jurnal yang ditulis oleh Tabak (2018). Tulisan ini mengkaji apa yang dilakukan Turki dengan Islam dalam kebijakan luar negeri. Turki dipandang menjadi lebih percaya diri dan secara konstitutif menebarkan wacana keagamaan dalam kebijakan luar negeri. Islam dimanifestasikan sebagai Seruan internasionalis untuk solidaritas Muslim dan kompetisi internasional dengan ajaran dan praktik yang mengakar. Namun demikian, tulisan ini juga menemukan pro-kontra terhadap sikap Turki yang demikian. Turki dianggap memfasilitasi hubungan antar negara yang melampaui batas, hingga ke domain sosial dan budaya. Dengan demikian, semakin kuat hubungan yang terjalin, semakin Turki dituduh mengikuti arus utama kebijakan luar negeri Islam yang kebanyakan mendukung ekstremisme Islam. Selain itu, organisasi-organisasi non-pemerintahan secara informal juga dituding mendukung ekstremisme yang terjadi di Timur Tengah. Di sisi lain, Turki dengan kepercayaan dirinya memandang bahwa tradisi Islam yang ada di Turki merupakan praktik yang otentik dan unggul. Mereka meyakini bahwa sintesis antara tradisi dengan modernitas akan menjadi nujum tombak penangkal radikalisme dan ekstremisme. Dengan demikian, tulisan ini memberikan pemaparan yang menyeluruh mengenai bagaimana tradisi, kultur, dan budaya keagamaan Islam di Turki dimanifestasikan dalam hubungan internasional. Namun, tulisan ini tidak menjelaskan secara detil bagaimana identitas tersebut dapat memengaruhi pembuatan kebijakan Turki dalam pembangunan masjid yang terjadi di Albania.

Tulisan kedua berasal dari Xhaferi (2017). Tulisan ini menjelaskan bahwa terdapat peningkatan hubungan bilateral antara Turki dan Albania, baik dari segi ekonomi, kebijakan luar negeri, energi, dan keamanan sejak pembentukan kedua negara-bangsa tersebut. Memang, dapat dilihat bahwa kekalahan komunisme pasca Perang Dingin telah menekan Albania di berbagai sektor dalam negeri yang pada saat Perang Dingin masuk dalam Blok Timur. Hal ini memberikan kesempatan emas Turki untuk lebih mendekat, mengingat Perang Dingin telah menyekat hubungan antara Turki dengan Albania. Sehingga pada abad ke-21 Turki menjadi mitra strategis Albania. Tulisan ini memang sempat menyinggung terkait perubahan Turki pada abad ke-21 yang ditandai oleh munculnya perselisihan dalam

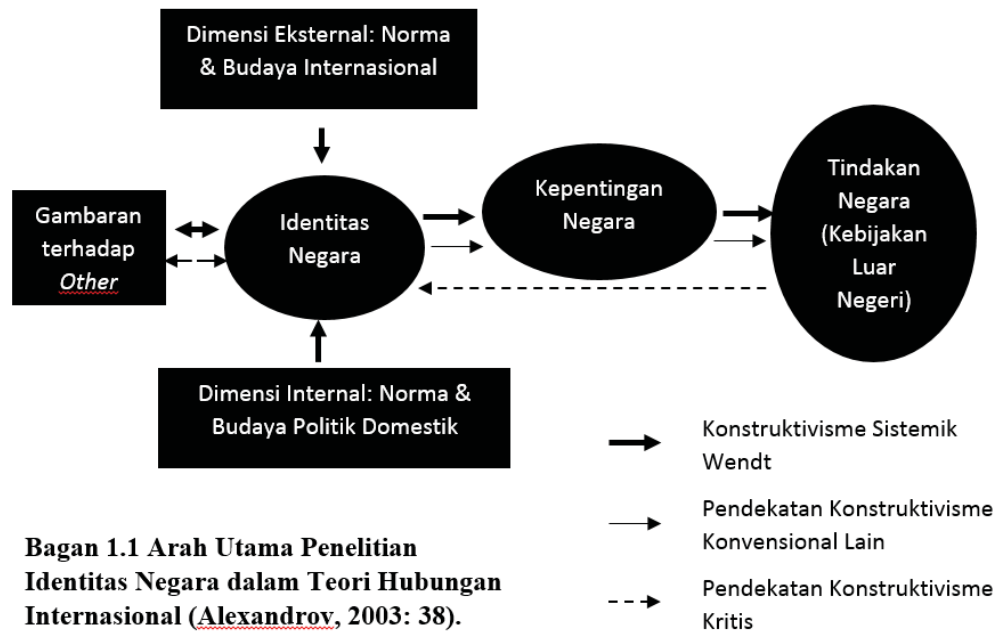
negeri Turki antara kaum sekularisme dengan kaum yang memiliki pandangan Neo-Ottomanisme. Namun, karena penekanan historis sangat kental dalam tulisan ini – ditandai dengan kerangka tulisan yang disusun secara kronologis –, tulisan ini tidak mampu menjelaskan sebuah kebijakan dapat terbentuk. Cakupan bahasan dalam tulisan ini terlalu luas, sehingga apabila dibandingkan dengan jurnal yang ditulis Tabak, terdapat perbedaan metodologi yang sangat kental di antara kedua tulisan. Namun demikian, tulisan ini dapat menjadi fondasi dalam menjelaskan bagaimana hubungan Turki dengan Albania sebelum adanya kebijakan Turki terkait pembangunan masjid di Albania.

Tulisan ketiga merupakan jurnal ilmiah yang disusun oleh Oktem (2012). Tulisan ini mendeskripsikan mengenai bagaimana instrumentasi lembaga sayap pemerintah – dalam hal ini Diyanet – untuk mengintensifikasi hubungan Turki dengan negara-negara di dataran Balkan. Tulisan Oini menemukan bahwa terdapat keterlibatan yang sangat mendalam Diyanet terhadap komunitas Islam yang ada di dataran Balkan. Seperti yang diketahui, masyarakat Muslim yang ada di Balkan memiliki aliran Sunni Hanafi, sehingga kedekatan aliran inilah yang menjadikan Diyanet sebagai representasi lembaga keagamaan di Turki yang mayoritas juga beraliran Hanafi, dapat diterima dengan baik. Selaras dengan tulisan Tabak sebelumnya, Oktem juga menjelaskan terdapat berbagai pihak yang kontra dengan kehadiran Diyanet di komunitas Muslim Balkan, seperti penolakan yang dilakukan oleh Reis Mustafa Efendi Cerić dari Bosnia. Namun di sisi lain banyak juga komunitas Muslim yang menerima kehadiran Turki yang sama-sama beraliran Hanafi, jika dibandingkan dengan kehadiran negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Arab Saudi dengan Salafi-Wahabinya atau Iran dengan Syiahnya.

Menurut penulis, ketiga tulisan di atas hanya memberikan deskripsi mengenai perubahan haluan kebijakan Turki yang semakin intensif ke dataran Balkan dengan orientasi identitas yang dimilikinya. Dengan kata lain, belum ada penjelasan spesifik mengenai kebijakan Turki dalam mendanai pembangunan masjid di Albania apabila ditinjau menggunakan sudut pandang identitas Neo-Ottomanisme yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini,

penulis berusaha menjelaskan mengenai bagaimana identitas Neo-Ottomanisme dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam pembentukan kebijakan luar negeri pada studi kasus pembangunan masjid agung di Albania.

1.5 Kerangka Pemikiran



Sebagai alat untuk menganalisis studi kasus yang diajukan, penulis menggunakan perspektif konstruktivisme dalam Hubungan Internasional. Konstruktivisme sendiri hadir sebagai penengah dalam perdebatan klasik teori-teori Hubungan Internasional seperti realisme dan liberalisme. Menurut Fierke dalam Dunne, Kurki, & Smith (2007), konstruktivisme berusaha memahami dan menjelaskan perubahan di tingkat internasional. Konstruktivisme yang muncul setelah Perang Dingin telah membawa perubahan signifikan dalam struktur masyarakat internasional, sehingga diperlukan sebuah teori alternatif untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang timbul setelah adanya Perang Dingin. Konstruktivisme memandang politik internasional sebagai '*a world of our making*' (Onuf, 2013), sehingga konstruktivisme merupakan sebuah pendekatan yang meyakini bahwa setiap bagian dari kehidupan sosial bukanlah suatu pemberian,

namun suatu akibat dari interaksi dari setiap aktor yang kemudian dibentuk secara konstruktif.

Konstruktivisme selanjutnya memiliki tiga asumsi dasar yang membentuknya (Burchill, Linklater, & Devetak, 2005). Asumsi pertama, bahwa identitas dan ide merupakan sumber dari segala tindakan aktor yang didapatkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial, serta merupakan pondasi dasar dari terbentuknya sebuah kepentingan. Asumsi kedua, kaum konstruktivis berpandangan bahwa struktur atau sistem internasional tidak mungkin tercipta jika struktur tersebut bukan hal yang benar-benar dikenal oleh aktor tersebut. Asumsi ketiga, konstruktivisme memiliki fokus dalam pembahasan mengenai bagaimana identitas dan ide bisa terbentuk. Proses interaksi antar aktor yang bersifat dinamis dan intersubjektif merupakan konstruksi dari dimensi pengetahuan bersama. Dari ketiga asumsi dasar tersebut, dapat dilihat bahwa konstruktivisme memandang sistematika ide, nilai bersama, sekaligus kepercayaan memiliki karakteristik struktural.

Untuk memahami bagaimana sebuah identitas dapat terbentuk, Wendt (1992) menjelaskan bahwa identitas nasional dapat terbentuk dari adanya kondisi politik, norma, dan budaya yang ada di dalam negeri, kemudian dipengaruhi pula dengan adanya norma sistem internasional. Lebih spesifiknya Alexandrov (2003: 39) menjelaskan bahwa identitas nasional terbentuk berdasarkan dua dimensi, dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal mengacu pada representasi dan keyakinan yang dianut oleh para aktor politik dan masyarakat umum dalam negeri. Aktor politik domestik sebagai representasi dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya dengan cara mengasumsikan bahwa negara adalah entitas tunggal sebagaimana individu, sehingga kepentingan dan aspirasi tersebut dapat digeneralisasi mengacu pada identitas nasional. Setelah aktor politik domestik memenangkan proses politik di dalam negeri, mereka dapat menerapkan kebijakan-kebijakan terkait berdasarkan norma-norma dan budaya politik yang diyakini dan dilakukannya. Oleh karena itu, dimensi internal terkait dengan norma dan budaya politik dalam negeri akan memengaruhi konstruksi identitas nasional.

Sedangkan dimensi eksternalnya mengacu pada representasi dan keyakinan di antara para aktor politik dan publik di luar negeri. Dengan kata lain, dimensi eksternal yang meliputi norma dan budaya internasional akan memengaruhi konstruksi identitas nasional juga.

Identitas nasional kemudian dapat menjadi penentu kepentingan sebuah negara (Wendt, 1992). Pada hakikatnya, sebuah negara tidak akan menjadikan sebuah tujuan sebagai kepentingannya apabila tujuan tersebut tidak sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh bangsanya, karena identitas juga mencerminkan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di negara tersebut. Penentuan kepentingan sebuah negara pada akhirnya menjadi hasil dari proses internalisasi mereka terhadap identitas mereka sendiri (Alexandrov, 2003: 36). Sehingga jika kepentingan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, maka negara tersebut akan berusaha untuk memenuhi kepentingannya dengan cara mengadakan interaksi dan hubungan kerja sama antar negara. Partisipasi sebuah negara di ranah internasional maupun regional kemudian dapat dipandang sebagai usaha negara tersebut untuk memenuhi kepentingan yang berdasarkan identitas nasionalnya. Selain itu, kepentingan nasional tercipta bukan secara eksogen, melainkan secara endogen. Meski terciptanya secara endogen, kepentingan nasional dapat dilaksanakan secara eksogen, yakni dengan cara menerapkan suatu kebijakan luar negeri.

Untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri dapat terbentuk atas adanya kepentingan tersebut, Day & Hudson (2020) menjelaskan bahwa konstruksi identitas dan kepentingan nasional secara habitual dapat membentuk kebijakan luar negeri. Pada dasarnya, kebijakan luar negeri adalah kepanjangan tangan dari kebijakan politik dalam negeri, oleh karena itu secara umum preferensi kebijakan luar negeri sebuah negara sangatlah dipengaruhi oleh kebutuhan, inspirasi, dan kondisi aktor-aktor yang ada dalam politik domestik. Keterlibatan aktor-aktor dalam negeri tersebut kemudian dapat menciptakan rezim-rezim dengan ideologi yang sesuai dengan aktor tersebut. Sehingga untuk mencapai stabilitas politik dalam negeri, kepentingan nasional harus menjadi faktor dominan dalam menentukan sebuah kebijakan. Untuk itu, kepentingan nasional haruslah didasari oleh norma

dan budaya politik yang dimiliki oleh masyarakat di negara tersebut. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai, norma, identitas, serta budaya masyarakat sedikit atau banyaknya juga dipengaruhi oleh budaya yang berasal dari luar negaranya.

Identitas yang berbeda antar negara akan menciptakan kepentingan dan kemudian kebijakan luar negeri yang berbeda juga. Meski kebijakan yang diterapkan oleh dua negara atau lebih itu sama, respons yang didapatkan dari masyarakat negaranya tentu akan tetap berbeda. Sehingga dapat dilihat bahwa penerapan kebijakan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan identitas nasional negara tersebut. Kedalaman sejarah yang dirasakan bersama antar negara juga akan mendorong penentuan kebijakan yang dapat diterapkan bersama. Untuk itu, peranan masyarakat kemudian dapat menguatkan legitimasi maupun kelancaran dalam penerapan kebijakan tersebut. Begitu pula sebaliknya, sekelompok masyarakat atau negara lain dapat melemahkan legitimasi dan kelancaran penerapannya, apabila kebijakan tersebut bertentangan pemahaman identitas dan kepentingan mereka. Sehingga apabila ada negara lain maupun organisasi yang mempunyai identitas dan budaya yang berbeda, maka negara tersebut akan cenderung untuk menutup diri (Day & Hudson, 2020).

1.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka argumentasi yang diajukan adalah sebagai berikut. Neo-Ottomanisme merupakan konstruksi baru identitas nasional Turki yang terbentuk dari adanya faktor norma dan budaya politik domestik, serta faktor norma dan budaya internasional, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan Turki untuk mendanai pembangunan masjid di Albania.

1.7 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berasal dari operasionalisasi konsep untuk dimanfaatkan sebagai bahan menjelaskan dan memahami sebuah peristiwa. Seperti yang disampaikan oleh Moleong (2004: 131) bahwa penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan mencocokkan antara realitas empiris dengan teori yang berlaku. Sehingga temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan realitas empiris di balik sebuah fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas.

1.7.1 Definisi & Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Neo-Ottomanisme

Neo-Ottomanisme pada mulanya dipopulerkan oleh Taspinar (2011: 9). Neo-Ottomanisme merupakan sebuah sebutan lain atas kebijakan luar negeri Turki yang mencerminkan kepercayaan diri dan aktivisme Turki terhadap negara atau wilayah-wilayah bekas Kekaisaran Ottoman di masa lalu. Sejak AKP berkuasa pada akhir 2002, Turki mulai bertransformasi dari citranya sebagai negara dengan sekularisme yang militan, westernisasi yang obsesif, dan penolakan terhadap warisan Islam-Ottoman, menjadi Turki yang perlahan mulai menerima identitas Muslimnya. Sebuah proses transformasi yang telah dimulai sejak tahun 1980-an oleh Turgut Ozal.

Transformasi tersebut menyebabkan berbagai macam modifikasi kebijakan luar negerinya, sepanjang garis yang lebih strategis dan multidimensi (Taspinar, 2011: 10). Kebijakan luar negeri Turki didasarkan pada apa yang disebut sebagai *Strategic Depth* atau Kedalaman Strategis, yakni sebuah gagasan yang diusulkan oleh Menteri Luar Negeri Turki pada waktu itu, Ahmet Davutoglu. Argumentasi utamanya adalah bahwa Turki adalah kekuatan besar yang sebelumnya telah mengabaikan ikatan bersejarah dan hubungan diplomatik, ekonomi, dan politiknya dengan Timur Tengah, Afrika Utara, Balkan, dan Eurasia, sejak era Ottoman. Sehingga, sejak Davutoglu menjadi menteri luar negeri, bersamaan dengan Erdogan menjadi perdana menteri, doktrin Kedalaman Strategis ini diterapkan.

Taspinar (2011: 9-10) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang dapat membantu mengidentifikasi kebijakan luar negeri Turki yang berorientasi Neo-Ottoman. Pertama, kesediaan Turki menerima warisan dari Kekaisaran Ottoman dan Muslim Turki. Kedua, rasa keagungan dan kepercayaan diri atas peran Turki di dunia. Ketiga, penerimaan atas keberagaman identitas yang ada di Turki, termasuk masa lalu kekaisaran Muslim dan multinasional yang dimilikinya. Dari ketiga identifikasi tersebut, dapat dipahami bahwa sikap Turki yang senantiasa membangun hubungan baik dengan negara-negara di Balkan – khususnya Albania –, adalah bentuk implementasi dari Neo-Ottomanisme.

1.7.1.2 Faktor Norma dan Budaya Politik Domestik

Untuk memahami norma dan budaya politik, penulis mengawalinya dengan definisi keduanya secara bahasa yang dilansir dari KBBI Daring (2022). Secara bahasa, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Sedangkan budaya politik adalah pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan dan memberi arti kepada tingkah laku dan proses politik dalam suatu sistem politik, mencakup cita-cita politik ataupun norma yang sedang berlaku dalam masyarakat. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa norma-norma yang berlaku merupakan salah satu elemen pembentuk budaya politik.

Dari segi istilah, Almond dan Verba (1990: 20) mendefinisikan bahwa budaya politik merupakan orientasi, sikap, dan nilai-nilai politik yang tercermin dalam sikap dan perilaku politik. Hal-hal tersebut merujuk pada kekhasan sebuah negara terhadap sistem politik dalam aneka ragam bagiannya. Lebih spesifiknya, menurut Widjaja (1982), budaya politik merupakan tindak budaya, sistem nilai dan keyakinan yang berhubungan dengan proses kehidupan politik, seperti legitimasi, program partai politik, kebijaksanaan pemerintah, perilaku pejabat, dan lain sebagainya. Dari kedua definisi tersebut dapat dilihat bahwa budaya politik berada pada tataran ideasional, yang mengatur serangkaian tindakan politik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk mempertegas definisi tersebut, Widjaja (1982) memberikan tiga perincian mengenai ciri-ciri budaya politik. Pertama, budaya politik biasanya berpijak pada norma-norma pokok dalam sebuah negara. Kedua, budaya politik biasanya tertanam pada pikiran dan perasaan individu. Ketiga, budaya politik pada umumnya dibentuk oleh tokoh masyarakat atau penguasa lebih dulu lalu diwariskan pada masyarakat melalui media massa, lingkungan kerja atau lingkungan sosial politik dalam pergaulan dan keluarga. Dari sini dapat dipahami bahwa budaya politik merupakan hasil dari serangkaian proses politik yang terjadi di sebuah negara.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Turki memiliki sejarah proses politik yang panjang, sehingga menimbulkan pembentukan, perubahan, dan penyesuaian budaya politik di dalam negeri. Pada awal kemerdekaan, Turki menganut budaya politik sekuler dan otoriter. Sedangkan sejak kemenangan AKP, Turki mulai membentuk budaya politik yang mengakomodasi norma dan budaya politik demokrasi, pembaratan, sekuler, dan Islam dalam kehidupan bernegara. Sehingga hal ini kemudian membentuk konstruksi identitas Neo-Ottomanisme di Turki, yang pada akhirnya memengaruhi kebijakan Turki atas pembangunan masjid agung di Albania.

1.7.1.3 Faktor Norma dan Budaya Internasional

Apabila norma dan budaya politik domestik merupakan wilayah kajian dari Ilmu Politik, norma dan budaya internasional merupakan kajian dari Hukum Internasional. Dalam Hukum Internasional, penekanan konseptualnya ada di norma internasional. Norma didefinisikan sebagai peraturan yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana sebuah aktor berperilaku (Kelsen, 2009: 4-5). Melalui norma tersebut maka sesuatu harusnya terjadi, terutama berkaitan dengan bagaimana sebuah aktor harus berperilaku dengan cara tertentu melalui otorisasi yang dimilikinya. Norma internasional tersebut biasanya berasal dari norma-norma domestik yang kemudian disosialisasikan dan diterapkan dalam sistem internasional.

Hal senada disampaikan oleh Finnemore dan Sikkink (1998: 893), norma internasional atau *global norms* adalah standar perilaku yang tepat atau harapan bersama yang dapat diterima oleh negara-negara maupun organisasi-organisasi antar pemerintah yang dapat diterapkan bagi mereka (negara-negara tersebut) maupun aktor-aktor non-negara lainnya. Untuk memahami norma lebih lanjut Onuf (2013: 66) menyebutkan bahwa ‘sekumpulan individu membuat peraturan (norma-norma), peraturan tersebut kemudian membentuk masyarakat, pada akhirnya peraturan masyarakat memandu individu berperilaku dengan cara tertentu’. Sehingga secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa norma internasional merupakan hasil dari interaksi antar aktor internasional. Norma internasional pada umumnya dapat berbentuk konvensi, perjanjian, komunique, maupun deklarasi (Martinsson, 2011: 2-3).

Dalam penelitian ini, norma internasional yang diangkat adalah, norma internasional Pan-Islamisme dan Kriteria Kopenhagen. Terkait dengan norma dan budaya internasional Pan-Islamisme, penulis berpendapat bahwa norma dan budaya internasional tersebut membentuk karakter politik Islam yang ada di Turki. Selanjutnya, terdapat norma-norma tertentu dalam Kriteria Kopenhagen sebagai syarat aksesi Uni Eropa, sehingga mendorong Turki untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma tersebut. Menurut penulis, kedua norma internasional tersebut berpengaruh terhadap pembentukan Neo-Ottomanisme, serta pada akhirnya memengaruhi kebijakan Turki atas pembangunan masjid agung di Albania.

1.7.1.4 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri atau *foreign policy* sebagai sebuah konsep tidak memiliki definisi tunggal. Untuk memahaminya, penulis memberikan tiga definisi dari para akademisi kebijakan luar negeri. Pertama, Rosenau (1974: 2) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan otoritatif yang diambil oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mempertahankan aspek-aspek tertentu yang diinginkan maupun mengubah aspek-aspek tertentu yang tidak diinginkan dari lingkungan internasional. Kedua, Holsti (1983: 97) menunjukkan bahwa kebijakan

luar negeri juga memasukkan ide-ide yang direncanakan oleh pembuat kebijakan, untuk memecahkan atau menegakkan beberapa perubahan di lingkungan internasional. Ketiga, Modelski (1962: 6) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai '*the system of activities*' atau sistem aktivitas. Menurutnya, kebijakan luar negeri dikembangkan oleh komunitas atau aktor-aktor dalam negeri, dengan tujuan mengubah perilaku negara lain dan menyesuaikan aktivitas mereka sendiri dengan lingkungan internasional.

Dari ketiga definisi yang disampaikan oleh para akademisi kebijakan luar negeri tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri adalah sebuah tindakan otoritatif dalam konteks internasional yang terbentuk melalui 'sistem aktivitas' dan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (kepentingan nasional) melalui proses interaksi dengan aktor *state* maupun *non-state* di luar negeri. Perilaku otoritatif ini dapat berbentuk pernyataan resmi aktor politik pemerintah, kunjungan-kunjungan luar negeri, komunikasi antar pemerintah, maupun produk-produk hukum pemerintahan lainnya.

Selanjutnya untuk memahami kebijakan sebagai *the system of activities*, Modelski (1962) menyebutkan setidaknya terdapat lima elemen pembentuknya. Pertama, pembuat kebijakan, yakni negara dan berbagai aktor politik di dalamnya. Kedua, *power* untuk mengeksekusi, yakni kekuatan nasional yang dimiliki oleh sebuah negara, seperti; ekonomi dan militer. Ketiga, konteks kebijakan dirumuskan dan dijalankan. Keempat, tujuan, yakni tujuan-tujuan tertentu terbentuknya sebuah kebijakan, seperti; eksistensi nasional, penguatan hubungan antar negara, dan lain-lain. Kelima, prinsip, yakni prinsip-prinsip yang mendasari terbentuknya kebijakan luar negeri.

Dalam penelitian ini, penulis memandang pendanaan Turki atas pembangunan masjid agung di Albania adalah sebuah bentuk kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh identitas baru Neo-Ottomanisme.

1.8 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini dilakukan dengan mencari fakta menggunakan interpretasi yang tepat (Whitney dalam Nazir, 2003: 16). Penelitian deskriptif juga memahami masalah, termasuk dengan sikap-sikap, kegiatan-kegiatan, pandangan-pandangan, serta hubungan-hubungan yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari sebuah fenomena (Nazir, 2003: 16). Untuk itu, dalam menyusun penelitian kali ini, penulis akan berusaha untuk menjelaskan dan memberikan gambaran terkait apa dimensi internal dan eksternal Neo-Ottomanisme yang dimiliki oleh Turki, sehingga dapat memengaruhi pembuatan kebijakan pendanaan pembangunan masjid yang ada di Albania.

1.9 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mengambil jangkauan mulai tahun 2010 hingga 2018, ketika awal mula pembangunan masjid direncanakan hingga rampungnya pembangunan masjid tersebut.

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Data dan acuan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan data-data sekunder. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar (2013: 42) bahwa data sekunder adalah data-data primer yang telah diolah terlebih dahulu, serta telah disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul data, maupun oleh pihak-pihak lain yang berkaitan. Data-data yang digunakan di dalam penelitian ini berupa naskah, buku, jurnal, koran, majalah, opini peneliti sebelumnya, makalah, artikel, serta media-media resmi pemerintah setempat.

1.11 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses menyusun dan mencari secara sistematis dari data-data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2017: 482). Hal ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data-data tersebut ke dalam kategori-kategori tertentu, menjabarkan di dalam unit-unit tertentu, melakukan sintesis,

menyusun ke dalam sebuah pola, memilih mana yang penting untuk diteliti, serta membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif, analisis yang digunakan adalah bersifat induktif, yakni sebuah analisis berdasarkan data-data yang diperoleh, sehingga selanjutnya dapat dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis (Sugiyono, 2017: 482). Data-data kepustakaan yang diperoleh digunakan sebagai informasi, yang kemudian saling dikaitkan untuk memahami perbedaan pendapat peneliti terdahulu, sehingga dapat menjelaskan valid atau tidaknya penelitian yang dilakukan.

1.12 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, metodologi penelitian.
- Bab II : Membahas tentang dinamika konstruksi norma dan budaya politik Turki sebagai dimensi internal yang mempengaruhi pembentukan Neo-Ottomanisme
- Bab III: Membahas tentang norma dan budaya internasional sebagai dimensi eksternal yang mempengaruhi pembentukan Neo-Ottomanisme.
- Bab IV: Membahas tentang analisis pengaruh Neo-Ottomanisme melalui pemaparan fakta-fakta dan kejadian dari awal wacana pendanaan hingga terealisasinya kebijakan pembangunan masjid agung di Albania oleh Turki.
- Bab V : Penarikan kesimpulan dari hasil analisis, penegasan kembali argumentasi penelitian berdasarkan temuan-temuan penting dalam pembahasan, serta poin-poin penting untuk penelitian lebih lanjut.